

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang harus di perhatikan oleh setiap negara di dunia. Dengan demikian, menjadi penting untuk mempelajari pertumbuhan ekonomi, Setiap negara terus berupaya meningkatkan tujuan ekonomi sebagai ukuran keberhasilan jangka panjangnya (Yogatama & Hidayah, 2022). Dibutuhkannya kerjasama ekonomi global untuk membantu kebutuhan bersama dan khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi para pemangku kepentingan dibenarkan (Sari & Kaluge, 2017).

Salah satu indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0.73%, karena Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), terjadinya Gangguan produksinya sektor migas, khususnya PT Arun LNG yang menyebabkan ekspor luar negeri turun drastis hingga 64,57 persen dan Penurunan produksi komoditas utama seperti kedelai akibat berkurangnya luas lahan panen. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi kembali stabil dan mengalami peningkatan sebesar 4.14% tahun 2019. Kemudian tahun 2020, Provinsi Aceh mengalami kontraksi ekonomi sebesar 0.37% akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh sektor perekonomian. Meskipun demikian, perekonomian nasional berhasil pulih dengan mencatat pertumbuhan sebesar 4.23% pada tahun 2023 (BPS Aceh, 2024).

Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan kapasitas produksi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang lebih banyak juga memperluas pasar, meningkatkan permintaan barang dan jasa, serta memperkuat perputaran ekonomi. Dengan demikian, produktivitas dan kesejahteraan dapat meningkat jika sumber daya penduduk dimanfaatkan dengan baik (Azulaidin, 2021).

Faktor lain yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah Upah Minimum. Pada hakekatnya, kenaikan upah minimum yang tepat dapat meningkatkan daya beli dan produktivitas tenaga kerja, mendorong permintaan produksi sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Guna & Yuliarmi, 2021). Teori upah efisiensi yang dikemukakan oleh Gregory Mankiw menjelaskan bahwa kenaikan upah dapat memotivasi pekerja menjadi lebih produktif, mengurangi turnover pekerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan kesehatan pekerja, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi perusahaan. Mankiw juga mengaitkan teori ini dengan fenomena ketidakmampuan perusahaan menurunkan upah meskipun ada kelebihan tenaga kerja (Agusalim & Novianti, 2024).

Faktor lain yang juga mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang

tersedia, sehingga menurunkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan (Ahmad, 2024). Menurut Keynes, jika permintaan agregat menurun, produksi juga akan turun sehingga pengangguran naik karena kapasitas produksi dan tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara penuh.

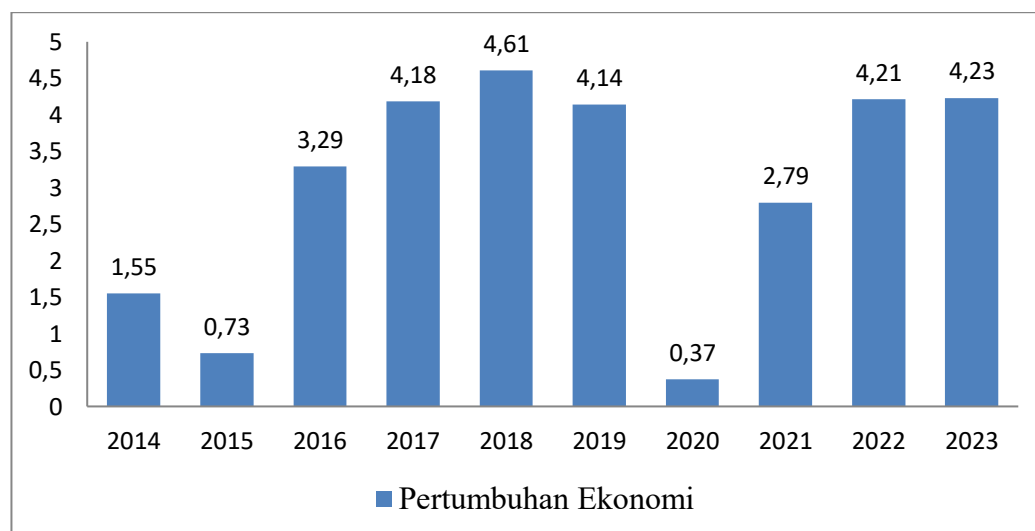
John Maynard Keynes dalam bukunya “The General Theory of Employment, Interest and Money” (1936) mengatakan bahwa permintaan agregat yang rendah menyebabkan penurunan produksi dan tingginya pengangguran. Menurut Keynesianisme, pentingnya intervensi pemerintah untuk meningkatkan permintaan agregat melalui pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur dan program sosial, guna merangsang pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pengangguran. (Junaidi, 2023).

Fenomena ini dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk dan kenaikan upah minimum secara positif, tetapi terkendala oleh tingkat pengangguran yang masih tinggi. Penting bagi pemerintah Provinsi Aceh untuk terus membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pelatihan agar dampak negatif pengangguran bisa ditekan dan upah minimum benar-benar memberi efek optimal bagi pertumbuhan ekonomi. Ketiga faktor ini sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dalam jangka panjang (Bariaty et al, 2022).

Ekonomi yang tumbuh positif, mampu mendorong kenaikan upah minimum serta harapan kesejahteraan. Namun, laju pertumbuhan ekonomi yang relatif sedang, masih menyisakan tingkat pengangguran yang cukup signifikan sebesar 5,50%. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang berada di 1,35% per

tahun berpotensi menambah tekanan terhadap pasar tenaga kerja, perlu penciptaan lapangan kerja agar tingkat pengangguran tidak naik. Kenaikan UMP yang dipengaruhi oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Tetapi, angka pengangguran menunjukkan tantangan pada penyerapan tenaga kerja (Bariaty et al, 2022).

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi dari dampak positif tarif nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Penentuan sektor potensial melalui besarnya kontribusi pendapatan sektoral tidaklah cukup, kebijakan otonomi daerah untuk mengatur daerahnya juga diperlukan (Kesuma, 2015). Analisis data ekonomi dapat membantu mengidentifikasi kemajuan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di provinsi aceh pada tahun 2014-2023 :



Sumber : *Badan Pusat Statistik Aceh(BPS)*, 2023

**Gambar 1. 1. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh
Tahun 2014-2023 (Persen)**

Data perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun global. Pada awal periode tahun 2014, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1.55%, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga tahun 2015, dengan angka terendah dalam dua tahun tersebut sebesar 0.73% karena terjadi kekosongan migas. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi mulai sedikit membaik pada tahun 2016 dan bertahan pada kisaran sekitar 3.29%. Pemerintah mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi jangka panjang hingga 2017 sebesar 4.18%, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh relatif stabil dan positif, dengan berbagai sektor seperti perdagangan, pertanian, dan migas berkontribusi signifikan.

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2019 sebesar 4,14%, melambat dibanding tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,61% dari segi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan usaha Pengadaan Air sebesar 27,25%. Tahun 2020, Provinsi Aceh mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi drastis hingga 0.37%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Bencana tersebut menimbulkan perlambatan perekonomian secara internasional, sehingga angka pertumbuhan berkontraksi untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 2.79%, meskipun belum mencapai tingkat signifikan. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh kembali menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 4,23% tahun 2023, lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang

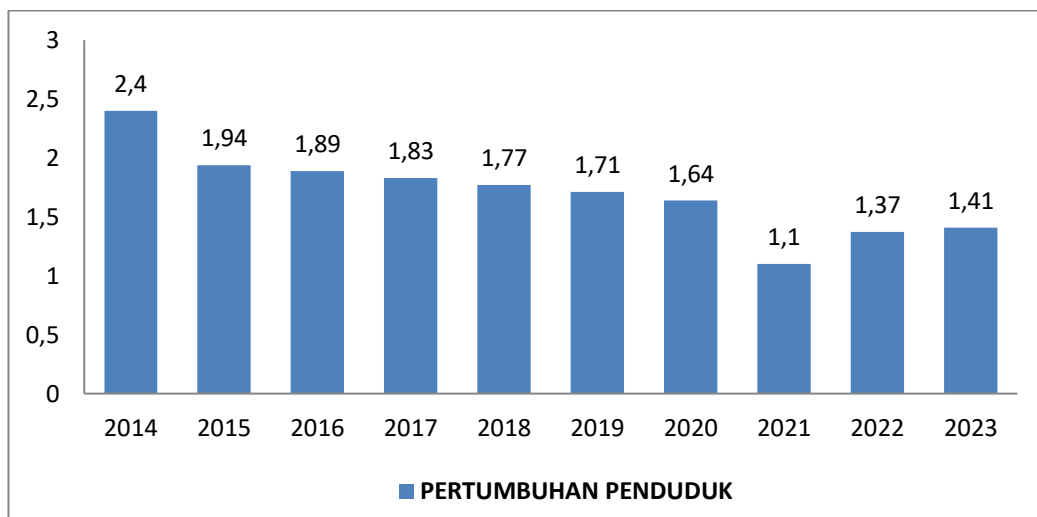
mengalami pertumbuhan sebesar 4,21%, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Fenomena yang terlihat dari data ini adalah Ketergantungan pada Dana Pemerintah (APBA) Ekonomi Provinsi Aceh sangat bergantung pada aliran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Ketergantungan ini menyebabkan fluktuasi ekonomi yang cukup besar, terutama jika terjadi keterlambatan pencairan atau hambatan dalam realisasi anggaran. Gangguan Produksi Migas dan Produksi minyak di Provinsi Aceh mengalami gangguan yang tidak terduga (unplanned shutdown), mengakibatkan kekosongan migas. Ini berdampak negatif pada pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi Aceh. Perlambatan dan Kontraksi Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19 menjadi masa paling berat yang menyebabkan perlambatan sebagian besar sektor ekonomi, pengurangan konsumsi masyarakat, dan gangguan aktivitas bisnis.

Variabel-variabel yang memengaruhi, antara lain pertumbuhan penduduk, upah minimum, serta tingkat pengangguran dapat menjadi determinan penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Dengan demikian, upaya penanganan berbagai permasalahan tersebut menuntut penerapan strategi yang menyeluruh serta keterlibatan sinergis antara pemerintah, dan elemen masyarakat guna menciptakan kondisi yang lebih aman dan tertib di seluruh Negara (BPS Aceh, 2021).

Peningkatan Pertumbuhan penduduk memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan pengelolaan yang cermat terhadap pertumbuhan

penduduk, dengan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi bukti-bukti nyata menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk yang cepat cenderung menurunkan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita di sebagian besar negara-negara berkembang terutama kondisi dasarnya masih miskin, amat bergantung pada sektor pertanian serta diliputi keterbatasan lahan serta sumber daya alam (Ubay 2022). Berikut perkembangan Laju Pertumbuhan penduduk di provinsi aceh tahun 2014-2023 :



Sumber: *Badan Pusat Statistik Aceh (BPS)*, 2020

Gambar 1.2. Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Aceh Tahun 2014-2023 (Persen)

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Aceh (2024), jumlah penduduk Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan selama periode 2014–2023. Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi modal pembangunan melalui bertambahnya jumlah tenaga kerja dan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa. Namun di sisi lain, pertumbuhan penduduk

yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan investasi justru dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi, seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya produktivitas. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Aceh mengingat pertumbuhan ekonomi daerah masih mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir.

Data pertumbuhan penduduk di atas menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2014 hingga 2023. Secara keseluruhan, angka pertumbuhan penduduk tertinggi tercatat pada periode awal tahun 2014 sebesar 2,4%, pada tahun 2015 mengalami penurunan signifikan sebesar 1.94%, di tahun 2016 menurun sebesar 1.89% hingga 1.83% pada tahun 2017 dan terus menurun sebesar pada tahun 2018 sebesar 1,77%, hal ini disebabkan adanya gangguan produksi Migas, inflasi ringan, dan rendahnya Pendapatan asli daerah, tetapi pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi justru mengalami peningkatan. ini sejalan dengan Teori Malthus yang menyatakan bahwa Apabila pertumbuhan penduduk menurun, tekanan terhadap sumber daya berkurang sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dapat meningkat. Penurunan pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih efisien (David, 2015).

Hal ini bertentangan dengan teori klasik Adam Smith yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena jumlah penduduk yang bertambah akan meningkatkan produksi barang dan jasa dengan lebih banyak penduduk tenaga

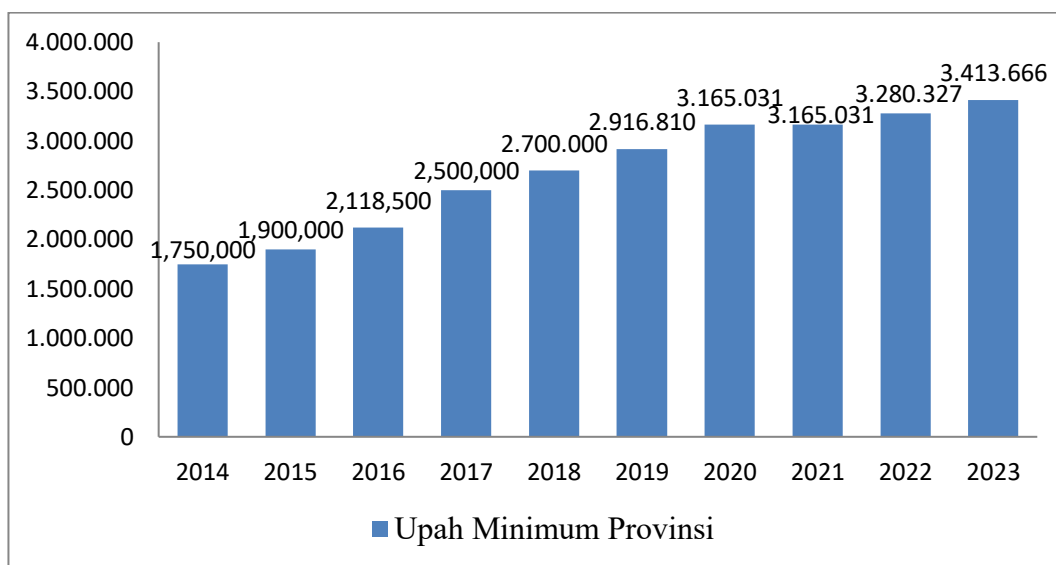
kerja juga bertambah sehingga kapasitas produksi meningkat sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi lebih tinggi spesialisasi kerja memungkinkan efisiensi yang lebih baik dan inovasi dalam proses produksi, pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Martadinata, 2024).

Pada tahun 2020 di Provinsi Aceh mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 1.64% hingga tahun 2021 menurun drastis sebesar 1.1%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Bencana tersebut menimbulkan perlambatan perekonomian secara internasional, terkhusus di Provinsi Aceh, sehingga angka pertumbuhan berkontraksi untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Aceh tahun 2022 menunjukkan perbaikan sebesar 1.37% hingga 2023 sebesar 1.41% angka tertinggi dekade terakhir. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau kebijakan tertentu, meskipun ekonomi sudah mulai pulih dari dampak pandemi.

Menurut (Wulandari et al. 2023) Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Selain itu, penelitian Wahyuni et al (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan persaingan pekerjaan semakin ketat sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan, yang secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk mempunyai pengaruh pada berbagai bidang, termasuk pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang banyak, seharusnya mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang cukup banyak serta bisa menjadi konsumen dalam jumlah besar. Sehingga kegiatan ekonomi berjalan terus menerus dan berkembang (Darma, 2021). Penelitian lain, menemukan pengaruh negatif pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang dapat memberi beban pada pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi kebijakan yang tepat (Nurjannah et al, 2023).

Selain itu, Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari segi upah minimum di Provinsi Aceh adalah permintaan tenaga kerja, penawaran tenaga kerja, dan inflasi. Upah minimum provinsi yang tinggi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh (Al Farisi, 2023). Berikut perkembangan upah minimum di provinsi aceh pada tahun 2014-2023 :



Sumber : *Badan Pusat Statistik Aceh (BPS)*, 2023

Gambar 1.3. Upah Minimum di Provinsi Aceh Tahun 2014- 2023 (Rupiah)

Upah minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, peningkatan UMP tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang stabil. Beberapa perusahaan, khususnya sektor usaha kecil dan menengah, masih menghadapi kendala dalam memenuhi standar upah minimum sehingga berpotensi mengurangi permintaan tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak selalu menghasilkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Data upah minimum pada tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan beberapa pola menarik. Dari tahun 2014 hingga 2023, upah minimum mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2014 UMP Aceh sebesar Rp1.750.000, dan meningkat sebesar Rp1.900.000 pada tahun 2015, akan tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0.73%, kenaikan upah minimum seharusnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli dan konsumsi. Namun, pada tahun 2015 pengaruh kenaikan upah minimum terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi relatif kecil dan tidak signifikan secara statistik. Kenaikan UMP menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga perusahaan melakukan efisiensi yang bisa menahan pertumbuhan ekonomi atau bahkan mengurangi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh (Safrida et al, 2014).

Upah minimum di provinsi aceh meningkat sebesar Rp2.700.000 tahun 2018, terus meningkat mencapai Rp2.916.810 pada tahun 2019, akan tetapi pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 4.14% pada periode tersebut. Hal ini terjadi karena Ketidakseimbangan antara Kenaikan Upah dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi. Meski upah minimum meningkat, kualitas infrastruktur ekonomi, investasi, dan pelatihan tenaga kerja di Provinsi Aceh belum memadai untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi meningkat. Kenaikan upah minimum meningkatkan biaya produksi, terutama bagi usaha kecil dan menengah, yang berdampak pada inflasi, harga barang naik sehingga daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah menurun dan menekan konsumsi yang menjadi pendorong utama

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, menyebabkan pengurangan tenaga kerja, peningkatan pengangguran dan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Faktor lain adalah fluktuasi sektor migas yang selama ini mendukung perekonomian di Provinsi Aceh dan ketidakseimbangan antara kenaikan upah dengan kualitas infrastruktur dan investasi yang belum memadai sehingga produktivitas dan daya saing daerah sulit meningkat. Jadi, meskipun upah minimum meningkat, faktor-faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun di Provinsi Aceh (Kasih et al, 2025).

ini sejalan dengan Teori Teori Neoklasik, mengatakan bahwa kenaikan upah minimum meningkatkan biaya produksi, mengurangi permintaan tenaga kerja dan investasi, sehingga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini bertentangan dengan Teori Upah Efisiensi (Efficiency Wage Theory) menurut Gregory Mankiw mengatakan bahwa membayar upah yang lebih tinggi dari tingkat keseimbangan pasar dapat meningkatkan produktivitas pekerja dengan beberapa mekanisme. Upah yang lebih tinggi memberikan insentif kepada pekerja untuk bekerja lebih produktif, mengurangi tingkat pergantian tenaga kerja (turnover), meningkatkan motivasi, kualitas kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Agusalim et al, 2024). Upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan insentif bagi pekerja yang lebih keras, dengan demikian upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Arthur et al, 2018).

Pada tahun 2020 upah minimum meningkat sebesar Rp.3.165.031, akan tetapi pertumbuhan ekonomi juga terus menurun mencapai 0.37%, peningkatan upah minimum di Provinsi Aceh terjadi penurunan terhadap pertumbuhan

ekonomi disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 secara global yang memberikan tekanan besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, sehingga mengakibatkan kontraksi ekonomi melalui berbagai sektor utama yaitu dari penurunan sektor perdagangan mengalami penurunan produksi sebesar 28.44%, impor luar negeri juga turun hingga 78,53%, dan peningkatan pengangguran yang menekan penurunan secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di provinsi Aceh (Al farisi, 2023).

Pada tahun 2021 hingga 2023 UMP terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi global juga sudah mulai membaik sebesar 2.79% tahun 2021, meningkat mencapai 4.23% tahun 2023. Dengan jumlah UMP sebesar Rp3.165.01 tahun 2021 hingga Rp.3.413.666 tahun 2023. Kenaikan upah minimum karena pemulihan aktivitas ekonomi setelah pandemi, peningkatan konsumsi masyarakat yang didukung oleh kenaikan upah minimum, dan stimulus ekonomi. Kenaikan daya beli masyarakat akibat upah minimum yang lebih tinggi membantu mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar ekonomi nasional (Kemenkeu, 2022).

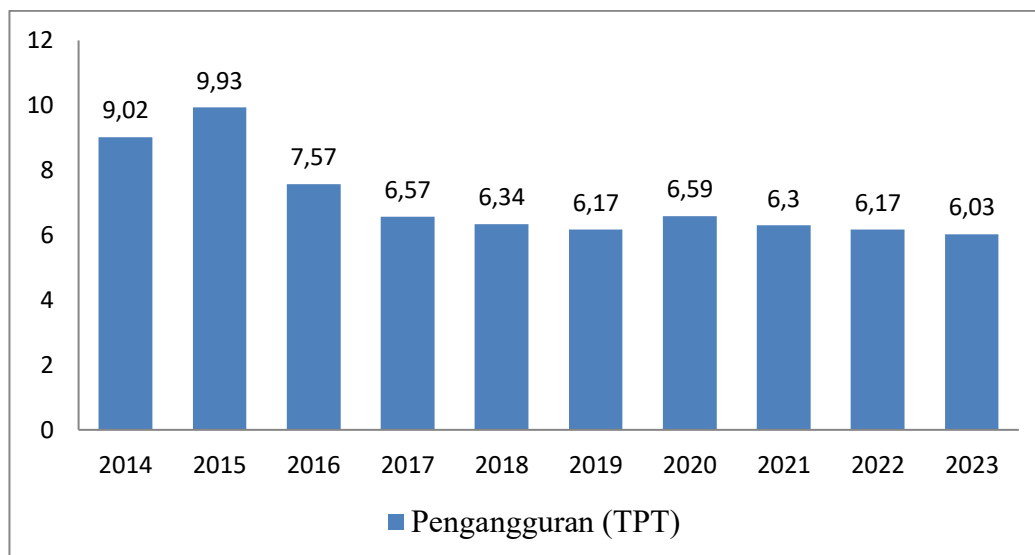
Menurut penelitian Fahira et al (2022) Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan pada pendapatan per kapita di Provinsi Aceh, karena upah yang lebih tinggi meningkatkan produktivitas dan kreativitas pekerja yang membuka lapangan kerja lebih luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, penelitian oleh Ahmaddien et al (2020) Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pengusaha mengurangi penggunaan tenaga kerja karena biaya upah meningkat, sehingga

menurunkan penyerapan tenaga kerja dan bahkan menimbulkan pengangguran. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya jumlah pekerja yang diserap sektor formal.

Penelitian oleh Rahmi & Riyanto (2022) menemukan bahwa kenaikan upah minimum memberikan spillover effect yang meningkatkan upah pekerja lain dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, terutama pada industri manufaktur. penelitian oleh Dewi (2019) Hasil penelitian mengindikasikan upah minimum jika terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan investasi karena biaya tenaga kerja yang membengkak, sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Peningkatan Upah minimum dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan pengangguran jika diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang tepat, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi secara makro (Yuliansyah, 2020). Tingkat pengangguran dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh karena pengangguran dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan pendapatan Negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Aceh adalah Pertumbuhan penduduk yang cepat, kesenjangan pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, keterbatasan keterampilan, kurangnya keterlibatan industri, keterbatasan lapangan kerja, kurangnya pelatihan dan pendidikan nonformal, faktor ekonomi makro, mobilitas tenaga kerja dan infrastruktur. Pengangguran dapat menjadi indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat pembangunan ekonomi (BPS

Aceh 2023). Berikut perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh pada tahun 2014-2023 :



Sumber : *Badan Pusat Statistik Aceh (BPS)*, 2023

Gambar 1.4. Tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2014- 2023 (Persen)

Tingkat pengangguran masih menjadi salah satu permasalahan utama pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Aceh selama beberapa tahun terakhir masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi angkatan kerja baru. Tingginya pengangguran tidak hanya menurunkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mengurangi daya beli, meningkatkan kemiskinan, serta menghambat proses pertumbuhan ekonomi daerah.

Tingkat pengangguran di Provinsi Aceh pada tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan pola fluktuatif. Pada awal periode tahun 2014 peningkatan Angka

pengangguran tercatat 9.02%, karena tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh mencapai lebih dari 16 persen, serta menimbulkan masalah sosial lain seperti kriminalitas dan ketegangan sosial, dampak dari konflik panjang yang masih dirasakan pada tahun sebelumnya sehingga investasi dan pengembangan sektor produktif belum maksimal sehingga menurunnya pertumbuhan sebesar 1.55% di Provinsi Aceh. Pada tahun 2015 pengangguran semakin meningkat secara signifikan sebesar 9.93%, yang merupakan titik tertinggi tingkat pengangguran, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi, keterbatasan lapangan kerja, dan kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga menciptakan situasi ketidakmampuan menyerap tenaga kerja secara efektif dan tingkat pendidikan yang belum memadai menyebabkan banyak lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan pengangguran. Faktor lain seperti minimnya investasi dan kondisi sosial politik yang kurang kondusif juga berkontribusi pada penurunan pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut.

Tingkat pengangguran pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6.34% hingga 6.17% pada 2019, karena adanya peningkatan lapangan kerja, tetapi pada waktu yang bersamaan pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan sebesar 4.61% pada tahun 2018 hingga 4.14% tahun 2019. Hal ini sejalan dengan teori Natural Rate of Unemployment menurut (Milton Friedman & Edmund Phelps) mengatakan bahwa penurunan pengangguran yang dipaksakan dapat menimbulkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jika pemerintah berusaha menurunkan tingkat pengangguran di bawah tingkat alamiah (natural rate of unemployment) melalui kebijakan moneter

atau fiskal yang ekspansif, maka hasilnya hanya berupa inflasi yang terus meningkat dan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi (Blanchard, 2021).

Hal ini bertentangan dengan teori Hukum Okun (Okun's Law), menurut Arthur Okun mengatakan bahwa Terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran cenderung menurun. Semakin banyak tenaga kerja yang menganggur, semakin sedikit barang dan jasa yang diproduksi, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat (Ball et.al, 2015).

Pada tahun 2020 bencana COVID-19 melanda seluruh Negara khususnya Provinsi Aceh, angka pengangguran meningkat menjadi 6.59%, yang merupakan tingkat pengangguran tertinggi kedua dalam lima dekade terakhir sebagai dampak dari penurunan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 6.3%, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun, tahun 2022 mencatat kenaikan tajam pada tingkat pengangguran hingga mencapai 6.17%, angka tertinggi ketiga dalam satu dekade terakhir. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau kebijakan tertentu yang mengakibatkan penurunan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Meskipun ekonomi sudah mulai pulih dari dampak pandemi. Kemudian, Tingkat pengangguran menurun selama setahun terakhir ini juga sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun sebesar 6,03% pada tahun 2023 dan

meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 4.23% pada periode tersebut (BPS Aceh, 2023).

Hal ini dijelaskan dalam teori empiris yang membahas adanya fenomena Jobless Growth, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang memadai, terutama di negara-negara berkembang yang mengalami perubahan struktural dan otomatisasi. Fenomena ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa terjadi tanpa penurunan pengangguran signifikan. penelitian ini hampir sejalan dengan teori aspek-aspek teori Keynesian yang menekankan penciptaan lapangan kerja secara aktif sebagai faktor penting dalam menurunkan pengangguran, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata (Ahmad, 2024).

Data tersebut mengindikasikan bahwa pengangguran merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh beragam faktor. Tingginya tingkat pengangguran berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah Investasi dan sektor industri di Provinsi Aceh masih terbatas, sehingga pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Sektor tradisional seperti perkebunan juga belum optimal dikelola, sehingga lulusan perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh secara individual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini karena peningkatan produksi barang dan jasa tidak selalu diikuti dengan penambahan tenaga kerja, melainkan dengan penambahan jam kerja bagi pekerja yang ada atau upah lembur. Pengangguran memberikan dampak negatif pada ekonomi

masyarakat dan kemiskinan, karena mengurangi pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Malahayatie, 2020).

Penelitian oleh pane et al (2024) menunjukkan bahwa penurunan satu poin persentase dalam tingkat pengangguran dapat mendorong pertumbuhan PDB hingga 2%. Selain itu, penurunan pengangguran memperbaiki kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan, yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Penelitian Krismonita (2021) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh, ada juga pengaruh dari inflasi, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi .

Menurut Nasir (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh belum optimal dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, hasil penelitian lain mengindikasikan bahwa Inflasi dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Kenaikan inflasi dan upah minimum cenderung meningkatkan angka pengangguran, karena biaya produksi naik dan pengusaha cenderung mengurangi tenaga kerja dan menurunnya pertumbuhan ekonomi (Rinanda, 2025). Permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang di atas adalah bahwa pertumbuhan penduduk, upah minimum, dan tingkat pengangguran merupakan faktor-faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada

pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penetapan upah minimum yang tepat, serta mengelola dampak pertumbuhan penduduk terhadap perekonomian dan menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Aceh.

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkelanjutan. Dengan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut, penelitian ini mencoba mengetahui sejauh mana pertumbuhan penduduk, upah minimum, dan tingkat pengangguran berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun.

Bedasarkan fenomena-fenomena dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 1994-2023”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dalam jangka pendek dan jangka panjang
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dalam jangka pendek dan jangka panjang
3. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dalam jangka pendek dan jangka panjang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya.
3. Sebagai sumber informasi tentang permasalahan Pertumbuhan Penduduk, Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber wawasan untuk memahami pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Upah Minimum dan Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi serta melihat dampak dari masing-masing variabel dalam penelitian ini.
2. Sebagai tambahan referensi bagi pemerintah terkait seperti penyesuaian pertumbuhan penduduk, upah minimum, tingkat pengangguran, dapat membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.